

# **PENDIDIKAN APRESIASI SENI UNTUK PLURALISME: Merayakan Keanekaragaman Budaya Nusantara**

(Sebuah Pengantar)

## **Pluralisme, Agama, dan Konflik**

Pluralisme atau keanekaragaman budaya adalah suatu keniscayaan: ia pasti didapati pada setiap masyarakat di mana pun. Teristimewa saat ini, ketika teknologi transportasi dan komunikasi telah mencapai kemajuan sangat pesat, maka kemajemukan merupakan *inevitable destiny* di tingkat global-mondial maupun di tingkat bangsa-negara dan komunitas. Namun, menyitir Martin Luther King Jr., meskipun secara fisik kita telah mampu untuk *tinggal bersama* dalam masyarakat majemuk, secara sosial-spiritual kita belum memahami makna sesungguhnya dari *hidup bersama* dengan orang yang memiliki perbedaan kultur, yang antara lain mencakup perbedaan agama dan etnisitas.

Persoalan ini merupakan salah satu penyebab utama dari terjadinya berbagai katastrofi sosial mengerikan. Di tingkat antarbangsa misalnya, Israel dengan Palestina, Amerika dengan Irak, Rusia dengan Chechnya, serta Bosnia dengan Serbia, terus berperang untuk saling meniadakan, mengakibatkan jatuhnya banyak korban dari kalangan sipil yang tak berdosa. Di tingkat intrabangsa, berbagai contoh juga dapat disebut: Hitler dan Nazi-nya di Jerman telah membuat jutaan kaum Yahudi kehilangan nyawa, Ku Klux Klan dan *Rednecks* di Amerika Utara atau *Skinheads* di Eropa atas dasar *white-supremacy* menyiksa dan membunuh kaum kulit hitam dan kulit berwarna lainnya, pertikaian suku Tutsi dan Hutu merobek keharmonisan Rwanda, dan konflik antara Protestan dan Katolik di Irlandia menimbulkan perang saudara ber-

kepanjangan. Di Indonesia sendiri, kerusuhan sektarian antara Muslim dan Kristiani di Ambon, Dayak dan Madura di Sumatra, serta Pribumi dan Tionghoa di berbagai kota terus membawa ancaman terhadap kerukunan dan integrasi bangsa.

Di samping contoh-contoh *pertikaian terbuka yang kasat mata* seperti disebut di atas, masih banyak lagi contoh lainnya yang lebih subtil dan *invisible*, yakni berupa ketegangan dan segregasi antarkelompok yang ditimbulkan oleh *prejudice* bernuansa *ethno-religious cleavages* (Augoustinos & Reynolds, 2001). Prasangka etnoreligius ini menciptakan hubungan antarkelompok yang iklimnya seperti "perang dingin" atau bagaikan api dalam sekam. Intensitas suhunya bisa meningkat karena pengaruh trauma sejarah, kesenjangan ekonomi, ketidakadilan sosial-politik, dan ketidakpastian hukum. Jika intensitasnya terus meninggi, maka sekam berapi ini dapat menyulut *pertikaian terbuka* dan kekerasan berdarah seperti yang kita saksikan di banyak wilayah di dalam maupun di luar negeri.

Berbagai kenyataan pahit itu menunjukkan bahwa secara kolektif kita belum mampu belajar tentang bagaimana hidup bersama secara rukun, di mana kita dengan sadar dan tulus memberikan toleransi dan apresiasi terhadap perbedaan sistem keyakinan (*belief systems*) kelompok-kelompok lain yang dicerminkan melalui pandangan dan gaya hidup yang berbeda dengan kita. Secara struktural, sistem politik yang diskriminatif di banyak negara, termasuk di Indonesia, telah mengkotak-kotakkan manusia berdasarkan golongan etnis, agama, dan atau kelas sosialnya, lalu menyalakan api konflik dan perang di antara berbagai kelompok tersebut. Secara kultural, agen-agen sosialisasi utama seperti keluarga, lembaga agama dan lembaga pendidikan tampaknya tidak berhasil menanamkan sikap toleran-inklusif, gagal menumbuhkan kemampuan menyelesaikan konflik secara damai (*non-violent conflict resolution*), dan tidak mampu mengajarkan hidup bersama secara harmonis dalam masyarakat plural (Brewer, 1999; Coleman, 1966; Allport 1954).

Lembaga agama dan sistem pendidikan yang mensosialisasikan nilai-nilai telah banyak dikritik sebagai lembaga yang cenderung merefleksikan dan menggemakan stereotip dan prasangka antarkelompok yang sudah terbentuk dan beredar dalam masya-

rakat. Bahkan, ada indikasi bahwa organisasi agama ikut mengembangkan prasangka dan mengescalasi fragmentasi antarkelompok melalui sosialisasi atau penyebaran pengetahuan dan pandangan yang bersifat *self-glory* dan *self-righteous*, sembari diiringi dengan pilihan menjalani dinamika relasi sosial-keagamaan yang segregatif. Bukan tak mungkin segregasi lembaga pendidikan berdasarkan kepemelukan agama juga ikut memperuncing prasangka dan proses demonisasi antara satu kelompok agama dan kelompok lainnya, baik secara langsung maupun tak langsung. Hal ini terjadi karena isi dan metode pendidikan agama cenderung bersifat deduktif-dogmatis dan eksklusif, yakni memperkuat *truth claim* yang dimiliki kelompok agamanya masing-masing dengan bersikukuh bahwa surga hanya diperuntukkan bagi kelompok "kami" (*us*) dan bukan kelompok "mereka" (*them*) yang "asing" (*foreign*) dan "lain" (*different*). Hal yang sama terjadi pada prasangka etnis yang mempunyai *interplay* erat dengan prasangka agama. Pelajaran Sejarah, IPS, dan PPKN yang mengacu pada kurikulum yang etnosentris juga turut memperkuat anggapan kaprah bahwa budaya "kami" adalah adiluhung dan mulia, sedangkan budaya "mereka" lebih rendah atau dekaden.

Sikap organisasi agama dan sistem pendidikan semacam ini tidak mengapresiasi dan menyantuni pluralitas, melainkan justru menegasikannya sehingga ikut mempertajam segregasi sosial dan mengescalasi ketegangan antarkelompok dan konflik sektarian. Dalam konteks masalah seperti ini, maka amat mendesak dan strategis bagi kita untuk segera merumuskan dan mengimplementasikan paradigma, pendekatan, dan metode pendidikan yang mampu menyantuni pluralitas. Sehingga ketegangan dan pertikaian antar kelompok etno-religius dapat dikurangi, digantikan oleh kehidupan bersama yang lebih damai dan menebarkan berkah bagi seluruh warga masyarakat. Karena itu, salah satu tugas utama lembaga pendidikan dan agama yang strategis dan mendesak adalah membentuk karakter cinta damai (*pacifist*) di kalangan siswa, serta menginternalisasikan sikap toleran dan apresiatif terhadap keanekaragaman (*diversity*) antar kelompok.

Dasar pemikirannya adalah bahwa lembaga agama dan lembaga pendidikan mempunyai peran besar dalam membentuk karakter para jamaah/penganut dan siswanya secara klasikal, di

mana lembaga-lembaga ini secara langsung maupun tak langsung mengajarkan dan mentransmisikan muatan budaya tertentu, berupa nilai-nilai, sikap, peran, dan pola-pola perilaku. Lembaga agama dan pendidikan seharusnya mampu menjadi *guiding light* yang berfungsi menuntun manusia berakhlak dan berbudi pekerti luhur, misalnya mampu mempraktikkan nilai-nilai demokrasi dan keadaban (*civility*), seperti menghargai pandangan dan hak asasi orang lain, menghindari kekerasan, menghormati keanekaragaman, dan mematuhi hukum (Coles, 1997). Sikap toleran dan inklusif dalam menghadapi pluralitas harus dipandang sebagai salah satu indikator integral dari akhlak atau budi pekerti luhur. Banyak literatur menyatakan (Mays, 1998; Stephan, 1996; St. John, 1975; Allport, 1954), salah satu prasyarat bagi terwujudnya hubungan antarkelompok yang lebih harmonis adalah menghilangkan stereotip dan prasangka negatif terhadap kelompok lain. Lembaga agama dan pendidikan dapat membantu mengurangi prasangka antarkelompok ini dengan menerapkan dakwah dan sistem pendidikan yang mengapresiasi pluralitas dan multikulturalitas. Tak kurang dari UNESCO menegaskan bahwa fungsi utama pendidikan bukanlah hanya terbatas pada *learning to know*, *learning to do* dan *learning to be*, tetapi juga *learning to live together*. Artinya, pendidikan seharusnya mengajarkan kepada setiap anggota masyarakat untuk menghargai kemajemukan dan membekali mereka dengan kemampuan untuk hidup bersama secara rukun sebagai sesama umat manusia.

Langkah strategis pertama yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan cita-cita besar ini adalah mengubah paradigma dan pola pikir dalam menyikapi perbedaan dan kemajemukan budaya dalam lembaga keagamaan dan sistem pendidikan. Wawasan pluralisme dan multikulturalisme yang inklusif, toleran, dan non-sektarian perlu dikembangkan sebagai wujud nyata motto kebangsaan Indonesia, *Bhinneka Tunggal Ika*, yang telah lama diingkari melalui uniformitas yang dipaksakan melalui dominasi sosial-politik Orde Baru yang berlanjut hingga sekarang. Pendekatan *truth-claim* dogmatis dalam dakwah dan pendidikan agama, serta pendekatan sentralistik dan segregatif dalam pendidikan selama ini kurang mempertimbangkan keunikan lokal *indigenous* dengan nilai sosial budayanya yang kaya dan beragam. Sehingga

kurang memberi ruang bagi tumbuhnya apresiasi terhadap budaya-budaya "yang lain" (*the others*). Pendekatan semacam ini perlu diubah menjadi pendekatan *desegregasi*, *toleransi*, dan *apresiasi* yang mengajarkan kepada penganut agama dan siswa didik untuk menghargai dan mengembangkan potensi dan sumber daya sosial-budaya yang ada dalam komunitasnya masing-masing, namun pada saat yang sama mereka juga mampu mengenali dan mengapresiasi budaya-budaya lain yang berbeda.

Pengakuan akan adanya keragaman dan perbedaan dalam kehidupan manusia sebetulnya merupakan nilai-nilai dasar dari agama Islam, seperti yang tertuliskan dalam al-Qur'an di mana bahwa Tuhan Allah SWT menyatakan bahwa Ia telah menjadikan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk bisa saling kenal-mengenal satu sama lainnya. Oleh sebab itu, kenyataan akan keberagaman dan perbedaan ini dapat dikatakan sebagai fitrah manusia dan realitas sosial yang mesti dihormati dan dipelihara.

Namun, dalam beberapa dekade terakhir, kesadaran adanya kenyataan akan keberagaman dan perbedaan tersebut, tidak lagi tumbuh dan berkembang akibat berbagai hegemoni dan dominasi, baik yang digerakkan kekuatan oleh politik, ekonomi, sistem pendidikan, maupun oleh kekuatan dari hegemoni pemahaman agama itu sendiri yang masuk ke dalam wilayah-wilayah budaya lokal (etnik) secara tak terelakkan. Terlebih lagi, dengan menguatnya penafsiran bahwa "yang Islami" adalah "yang Arabi" (berkiblat atau menggunakan idiom dan simbol-simbol budaya Arab), maka masyarakat Muslim di berbagai daerah kurang mengapresiasi keragaman dan perbedaan yang mengada dalam budaya lokal. Dengan penghakiman dan pelabelan "tidak Islami" terhadap isi dan ekspresi budaya lokal, termasuk kesenian, maka banyak komunitas-komunitas dan organisasi-organisasi agama bersikap apriori terhadap seni dan budaya lokal. Sikap ini pada gilirannya menciptakan komunitas-komunitas Muslim yang tercerabut dari akar budayanya sendiri dan tidak lagi mengenal jati diri budaya asalnya. Padahal, jika bersedia membuka empati terhadap nilai-nilai yang dikandung budaya lokal, akan didapati bahwa nilai-nilai tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, bahkan mungkin sebagiannya mengalami interseksi dengan nilai-nilai Islami. Di sisi lain, sikap apriori ini juga dapat membawa pada sikap pengerasan

agama, di mana kelompok atau organisasi agama tertentu merasa memiliki otoritas sakral untuk menghakimi seni-budaya lokal yang berbeda dengan idiom-idiom budaya Arab sebagai “sesat”, “musyrik” atau “kafir”, padahal secara esensial mungkin idiom-idiom budaya lokal tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, seperti nilai-nilai demokrasi, pengelolaan lingkungan alam secara bersahabat, gotong royong, dan sebagainya.

### **Penyemaian Pluralisme melalui Pendidikan Seni**

“*Schools, those factories of despair.*” Sekolah, pabrik yang memproduksi kemeranaan. Pernyataan itu digoreskan oleh dokter anak sekaligus penyair, William Carlos Williams setengah abad lalu. Namun, ratapan serupa ternyata masih diperdengarkan banyak ahli pendidikan saat ini di berbagai masyarakat bangsa, termasuk di Indonesia. Kritik dari berbagai pakar ilmu pendidikan dan ilmu budaya banyak memotret ruang-ruang kelas di Indonesia sebagai mesin yang menumpulkan dan bahkan merusak pikiran, hati, dan jiwa anak didik. Salah satu kritik masyarakat terhadap pendidikan Indonesia adalah miskinnya daya kreativitas, imajinasi, dan inovasi pada anak-anak kita dikarenakan kuatnya penyeragaman dan bahkan pemasungan kebebasan berekspresi dan berkreasi yang dipaksakan oleh sistem sekolah.

Kritik lain yang juga kuat ditujukan pada respon kedodoran lembaga-lembaga pendidikan kita dalam mensikapi keanekaragaman atau pluralisme sosial-budaya yang merupakan keniscayaan di negara kepulauan multietnis ini. Alih-alih menumbuhkan sikap dan laku toleran-inklusif yang bisa menyumbang penyelesaian friksi dan konflik sosial yang menajam akhir-akhir ini, pengajaran eksklusif, apalagi dengan justifikasi *truth claim* dogma agama, ditengarai telah menambah *blunder* masalah.

Daftar kritik tentu bisa bertambah panjang jika kita membahas bagaimana sistem pendidikan kita sangat mementingkan hasil instan (lebih berorientasi pada *intellectual intelligence* seperti ranking, NEM, dan gelar) daripada proses belajar yang mencerahkan dan mematangkan peserta didik (*emotional* dan *spiritual intelligence*); kurikulum yang terlalu padat dan tidak relevan dengan tantangan masa kini maupun masa depan; kualitas guru/ pendidik

yang masih jauh dari harapan; sarana dan prasarana yang terbatas; dan seterusnya.

Sejalan dengan itu, pendidikan seni di tingkat pendidikan dasar dan menengah (SD sampai SMU) juga ditengarai telah mengalami keterpinggiran seperti yang tercermin paling sedikit dalam tiga hal. *Pertama*, pendidikan seni dianggap lebih rendah daripada jenis pendidikan atau mata pelajaran yang lain. Akibatnya, pendidikan seni dimasukkan sebagai materi kurikulum muatan lokal, dan tidak dianggap sebagai mata pelajaran yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kemajuan peserta didik. Akibat yang lain adalah pendidikan seni diberikan dalam jumlah jam sangat terbatas, padahal cakupan materinya terentang sangat luas. Jumlah durasi waktu untuk pelajaran seni tidak sebanding dengan jumlah jam yang disediakan untuk mata pelajaran lainnya. Akibatnya, pendidik seni mendapatkan kesulitan di dalam menentukan materi yang perlu diberikan kepada peserta didik berdasarkan jumlah jam yang disediakan.

*Kedua*, pendidikan seni seringkali tidak diberikan secara profesional. Karena di banyak sekolah seringkali tidak diampu oleh pendidik seni, melainkan oleh guru yang berlatar belakang pendidikan lain atau oleh guru kelas (ini terutama terjadi di tingkat SD). Selain itu, keterpinggiran pendidikan seni diperparah dengan terjadinya distorsi dan reduksi di dalam memaknai pendidikan seni. Pendidikan seni diberikan dengan penekanan pada aspek teoritis-kognitif atau pada aspek pengetahuan, dengan mengabaikan praktik dan pengalaman berkesenian.

*Ketiga*, pendidikan seni tidak dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk sumber rujukan dan perlengkapan atau peralatan kesenian. Kondisi ini tidak memungkinkan terjadinya proses penghayatan dan pergaulan dengan seni yang lebih mendalam, penggalian potensi, dan pengembangan kreativitas seni peserta didik.

Permasalahan-permasalahan di atas secara keseluruhan menunjukkan terjadinya fragmentasi di dalam pendekatan pendidikan sebagai proses penyiapan sumber daya manusia. Fragmentasi tersebut berupa ketimpangan di dalam pengembangan kepribadian peserta didik karena terlalu menekankan pada aspek logika dan

kognitif, dan kurang memperhatikan aspek etika dan estetika. Penekanan berlebihan pada aspek logika tersebut tidak hanya di dalam kurikulum, melainkan juga metode pembelajaran, dan sistem evaluasi yang diterapkan.

Sementara itu, aspek estetik pada hakikatnya bukan sekadar berhubungan dengan keindahan. Pengembangan aspek estetik juga akan melahirkan kehalusan perasaan, kearifan, dan keluhuran budi, bahkan kreativitas dan kecerdasan. Dengan demikian, pendidikan perlu lebih memberikan perhatian lebih besar pada pendidikan seni, yang lebih dari sekadar teori dan keterampilan. Karena pendidikan seni yang hanya memberikan teori atau keterampilan seni tidak akan menumbuhkan budi pekerti luhur dan tidak memperkaya moralitas siswa. Bahkan, pendidikan seni seperti ini cenderung mengarah pada proses degradasi makna apresiasi seni, yang selanjutnya mengakibatkan hilangnya kreativitas, kearifan, dan kecerdasan masyarakat.

Pendidikan seni di sekolah seyogyanya diberikan dengan pendekatan apresiasi. Pendidikan seni dengan pendekatan apresiasi dimaksudkan untuk menumbuhkan minat dan apresiasi siswa untuk menghargai dan menikmati seni, merangsang kemampuan berseni, serta memanfaatkan pengalaman estetikanya dalam kehidupan sehari-hari. Di samping itu, pendidikan seni dengan pendekatan apresiasi diharapkan dapat membantu peserta didik memanfaatkan alam di sekeliling mereka sebagai inspirasi untuk mengembangkan rasa berseni sehingga menumbuhkan kesadaran spiritualitas melalui apresiasi tentang keindahan ciptaan-Nya yang dirasakan, dilihat, didengar, dan dinikmatinya.

Apresiasi yang dimaksud di sini mencakup kegiatan perolehan persepsi, pengetahuan, pengertian, analisis, penilaian, keterlibatan, dan penghargaan pada seni. Apresiasi adalah kegiatan komunikasi siswa dengan seni. Apresiasi adalah semua hubungan seseorang dengan kesenian. Termasuk apresiasi adalah persepsi, pengetahuan, pengertian, analisis, keterlibatan, penghargaan, penikmatan, dan reaksi atau respons. Konsep apresiasi mencakup pendidikan rasa. Apresiasi dapat diajarkan dengan metode belajar, Misalnya, uraian mengenai sejarah kesenian, latar belakang sosial, teknik pertunjukan atau pembuatan, dan konsep analitis. Apresiasi bisa juga diajarkan melalui pengalaman langsung. Misalnya, siswa

menonton pertunjukan atau pameran, mendengarkan rekaman, menonton video, dan berpraktik serta berimprovisasi sendiri dengan instrumen dan unsur-unsur kesenian lainnya.

Jenis kesenian yang dipilih seyogyanya adalah kesenian tradisi Nusantara, karena sebagai anak bangsa, peserta didik sudah selayaknya mengetahui khazanah kesenian tradisi bangsanya sendiri. Kesenian tradisi merupakan suatu ensiklopedi etnis yang menyimpan segala sesuatu yang dianggap penting oleh masyarakat pendukungnya. Kesenian tradisi sarat akan pesan-pesan filosofis, baik aspek spiritualitas maupun aspek sosial. Karena ia merupakan ekspresi hidup dan kehidupan serta sumber inspirasi spiritual, moral, dan sosial dari komunitasnya. Dalam lingkaran kecilnya kesenian tradisi terbukti memiliki pesan signifikan dalam mencairkan ketegangan sosial. Dengan demikian, apresiasi terhadap kesenian tradisional Nusantara ini diharapkan membantu peserta didik mengenal jati dirinya dan sekaligus memahami pluralitas identitas bangsanya. Pada gilirannya, mereka akan mampu menghormati perbedaan dan keanekaragaman, dan secara arif menerima realitas pluralitas budaya masyarakat Indonesia.

### **Secerach Respon Alternatif: Pendidikan Apresiasi Seni untuk Pluralisme**

Dengan latar belakang pemikiran di atas, kami di Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial (PSB-PS) Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), dengan dukungan *The Ford Foundation* dan bekerjasama dengan Sekolah Tinggi Seni Indonesia di Surakarta dan Forum Pendidikan Apresiasi Seni di Sumbar, melakukan uji coba Pendidikan Apresiasi Seni (PAS) di sekolah-sekolah dasar berafiliasi Muhammadiyah dan yayasan Islam lainnya di Jawa Tengah dan Sumatra Barat. PAS di Surakarta dilaksanakan sejak Agustus 2001, sedangkan PAS di Sumbar mulai dirintis persis setahun kemudian, setelah pelaksanaan semiloka mengenai PAS pada Juli 2002 menginspirasi kami untuk memperluas cakupan wilayah ujicoba program ini.

Program PAS dirancang karena kesadaran bahwa dengan format praktik ekstrakurikulernya, PAS mampu memberi anak-anak kesempatan bergaul dan "mengalami" kesenian lokal, dengan tuju-

an menumbuhkan apresiasi mereka terhadap kemajemukan seni-budaya di sekitar lokus asal atau lokus tinggal mereka. PAS juga menyediakan ruang untuk mengembangkan imajinasi dan kreativitas mereka, sesuatu yang sulit didapat melalui sistem pendidikan kita yang lebih mendahulukan hapalan, uniformitas dan kecerdasan kognitif daripada pengertian, kebebasan berekspresi, dan kecerdasan emosional-spiritual.

Buku ini merupakan hasil *proceeding* kegiatan seminar-lokalkarya (semiloka) dengan tema "Pendidikan Apresiasi Seni: Merayakan Keanekaragaman Budaya Nusantara" yang diselenggarakan oleh PSB-PS UMS pada 28-30 Juli 2002 di Surakarta. Dalam semiloka ini antara lain dibahas pertanyaan-pertanyaan berikut: *fungsi apa saja dari Pendidikan Apresiasi Seni Nusantara yang dapat diraih, bahan apa yang digunakan, bagaimana cara penyampaiannya, apa media atau sarananya, pendekatan apa yang paling cocok untuk anak-anak usia dasar, serta sumber-sumber apa yang perlu dipakai?* Forum semiloka ini telah menghasilkan kemasan konsep pendidikan apresiasi seni –meski baru berupa *draft*— yang diharapkan lebih mampu mengaktualisasikan potensi-potensi kreativitas, produktifitas, serta kemampuan inovatif siswa, dalam kerangka membangun masyarakat pluralistik dan multikultural. Semiloka ini merupakan bagian dari program unggulan PSB-PS UMS dengan tema "Dialektika Agama dan Pluralitas Budaya Lokal". Dengan program ini PSB-PS berharap dapat membantu Persyarikatan Muhammadiyah khususnya dan masyarakat Islam umumnya, dalam mempersiapkan perangkat metodologi dan merevisi pandangan tentang hubungan dialektik dan rekonsiliatif antara agama dan budaya. Harapan ini dapat diperankan dalam gerakan apresiasi seni budaya dan strategi kebudayaannya, antara lain berupa kajian-kajian kritis tentang seni-budaya, festival seni, dan pendidikan apresiasi seni, khususnya seni Nusantara dengan mengedepankan dimensi positifnya, yaitu pesan-pesan luhur yang terkandung di dalamnya, dan membuang bias-bias dan kesan negatif yang melekat padanya.

Secara lebih spesifik, tujuan dari semiloka ini adalah:

1. Merekonstruksi "visi baru" pendidikan seni dalam rangka meningkatkan keluhuran budi dan membangun apresiasi terhadap kemajemukan budaya dan masyarakat Indonesia dengan

menggali nilai-nilai seni tradisi Nusantara sebagai sumber kearifan moral, spiritual dan sosial.

2. Melakukan identifikasi problem dan pemetaan potensi di sekolah dasar-menengah sebagai *database* rujukan dalam upaya inisiasi implementasi pendidikan apresiasi seni Nusantara.
3. Merumuskan langkah-langkah konkrit dan strategis untuk implementasi pendidikan apresiasi seni Nusantara melalui kerjasama sinergis antara berbagai komunitas/ masyarakat dengan lembaga pendidikan dan organisasi sosial terkait.

Peserta semiloka PAS berjumlah sekitar 50 orang. Peserta merupakan perwakilan dari sekolah tingkat dasar dan menengah (diwakili Kepala Sekolah dan Guru Pelajaran Kesenian); pakar/pelaku/peminat pendidikan, khususnya dalam bidang pendidikan seni dan multikulturalisme; ahli-ahli ilmu sosial-humaniora dari berbagai lembaga dan daerah; perwakilan Persyarikatan Muhammadiyah (Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah, Majelis Tarjih, Majelis Tabligh, Lembaga Seni dan Budaya di tingkat PP Muhammadiyah maupun PWM dan PDM); dan pejabat Dikdasmen dari lingkungan Diknas pusat maupun Diknas daerah.

Semiloka PAS ini menggunakan metode gabungan antara metode seminar dan metode lokakarya. Metode pertama diterapkan untuk mendiskusikan sesi I dan II yang lebih bertumpu pada narasumber. Metode kedua menerapkan metode RTD (*Round-Table Discussion*) untuk sesi III, IV, dan V, di mana semua peserta diberi peluang yang sama untuk membahas topik yang disajikan. Untuk merangsang peserta terlibat aktif dalam pembahasan topik dalam sesi III-V, setiap pembahasan topik diawali dengan pengajuan problem terkait atau pemberian modul masalah. Kami melakukan perekaman dan transkripsi untuk semua sesi, yang hasil suntingannya dapat Anda nikmati dalam buku ini. Untuk menjaga aktualitas isu, kami tambahkan apendiks berupa paper ringkas yang dipresentasikan di hadapan *Board of Trustees* dari *The Ford Foundation*, di New York.

Akhir kalam, saya wajib berterima kasih kepada banyak pihak yang telah memungkinkan gagasan tentang PAS ini berkembang, menemukan lahan subur untuk diimplementasikan secara nyata, dan selanjutnya menyebar sebagai inspirasi bagi kalangan-kalangan-

an lain yang tertarik dan peduli pada soal yang sama. Terimakasih ditujukan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pimpinan Universitas Muhammadiyah Surakarta, Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah, Dinas Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Sekolah Tinggi Seni Indonesia di Surakarta, Forum PAS Sumbar, sekolah-sekolah dasar yang berpartisipasi dalam ujicoba program PAS, dan *The Ford Foundation* kantor Jakarta, yang telah memberikan dukungan amat berharga. Saya juga menghaturkan apresiasi mendalam kepada Drs. M. Thoyibi, M.S, Dr. Nanik Prihartanti, Dra. Atiqa Sabardila, M.Hum., dan Dra. Usmi Karyani, M.S., empat sahabat di PSB-PS yang telah sama-sama bertekun memperkaya pengembangan gagasan PAS dan secara konkrit mengimplementasikannya di lapangan. Dan, terakhir namun sama pentingnya, terima kasih kepada Almuntaqo Zain, Fajar Riza Ul-Haq, Dwi Setyaningsih, Alex Iskandar dan Farid Darmawan yang menjadi tulang punggung PSB-PS dalam merealisasikan PAS secara nyata.

Semoga buku ini memberikan kontribusi bagi upaya menemukan solusi edukatif terhadap persoalan keterpurukan sistem pendidikan maupun kerusakan spirit pluralisme dalam tatanan sosial-budaya kita. Paling tidak, sebuah tawaran alternatif berupa pendidikan apresiasi seni untuk pluralisme telah mulai kami gulirkan. Berhasil tidaknya program ini mencapai visinya akan tergantung pada motivasi, usaha, dan stamina kita dalam menekuninya terus-menerus secara arif dan cerdas.:

Surakarta, Januari 2004

Yayah Khisbiyah  
Direktur PSB-PS UMS

## Daftar Pustaka

- Allport, Gordon W. 1954. *The Nature of Prejudice*. Cambridge, Massachusetts: Addison-Alley.
- Augoustinos, M. & Katherine J. Reynolds. 2001. *Understanding Prejudice, Racism, and Social Conflict*. London: Sage Publications.
- Brewer, Marilynn, B. 1999. "The Psychology of Prejudice: Ingroup Love or Outgroup Hate?" Dalam *Journal of Social Issues*, 55 (3), p. 429-444.
- Coleman, James S. et al. 1966. *Equality of Educational Opportunity*. Washington D.C.
- Coles, Robert. 1997. *The Moral Intelligence of Children*. New York: Random House.
- Goleman, Daniel. 1995. *Emotional Intelligence*. New York: Bantam Books.
- Mays, Vickie M. et. al. 1998. "Ethnic Conflict: Global Challenges and Psychological Perspectives". *American Psychologist*, 53(7), p. 737-742.
- Slovan, Margie. 1997. "Paddling up Stream: Catholic and Protestant Youth in Northern Ireland Embark on a Brighter Future". *Teaching Tolerance*, Spring 1997. Montgomery: Southern Poverty Law Center.
- Stephan, Walter G., & Cookie W. Stephan. 1996. *Intergroup Relations*. Boulder: Westview.
- St. John, Nancy. 1975. *School Desegregation: Outcomes for Children*. New York: Wiley.